BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerja sama antarnegara di era globalisasi sangatlah dibutuhkan. Terlebih lagi tidak ada satupun negara di dunia yang bisa berdiri sendiri karena beberapa keterbatasan yang dimiliki. Adanya era globalisasi membuat negara-negara di dunia saling terikat satu sama lain atau tidak memiliki batasan. Artinya antar satu negara dengan lainnya saling menjalin hubungan, termasuk melakukan kerja sama. Mengapa kerja sama antarnegara diperlukan pada era globalisasi? Dikutip dari buku Hukum Ekonomi Internasional (2020) karya Hanif Nur Widhiyanti dan kawan-kawan, kerja sama antarnegara, terlebih di era globalisasi, merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Kerja sama ini terjalin karena negara mempunyai kemudahan akses untuk melakukan kerja sama baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, politik, serta lainnya. (kompas.com)

Di era globalisasi, kerja sama antarnegara sangat diperlukan karena tantangan dunia semakin beragam dan kompleks. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor sebuah negara yang tidak dapat berdiri sendiri karena memiliki keterbatasan, khususnya sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki sebuah negara. Menurut John E.H.J. FoEh dalam buku Perencanaan Bisnis (*Business Plan*): Aplikasi dalam Bidang Sumber Daya Alam (2020), perbedaan sumber daya alam menyebabkan hasil produksi tiap negara berbeda. Adanya kerja sama antarnegara di era globalisasi diharapkan dapat mempermudah suatu negara dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu contoh kerja sama antarnegara di bidang perdagangan internasional adalah kegiatan impor. (kompas.com)

Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Perdagangan internasional dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda. Dengan kata lain, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut ada juga peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayaran, berbagai pihak terkait dengan perdagangan internasional. Dalam rangka kegiatan impor ini dikenakan tiga kewajiban yang harus dibayarkan dalam perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor, Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk (BM) yang terdapat pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). (kompas.com)

Tabel 1.1 Data Pajak Impor Tahun 2018 – 2022

Tahun	BM (Rp)	PPN (Rp)	PPh 22 Impor (Rp)	Presentase
2018	26.920.000	19.041.000	16.487.000	1,95%
2019	128.731.000	155.308.000	71.128.000	11,11%
2020	480.965.000	911.279.000	397.823.000	55,99%
2021	99.308.000	170.352.000	89.378.000	11,23%
2022	185.245.000	253.275.000	191.987.000	19,72%

Sumber: CV. Delima Mandiri

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah salah satu contoh dari Pemberitahuan Pabean. Fenomena yang kerap terjadi di lapangan bahwa seringkali ditemukan beberapa jenis kesalahan dalam pemberitahuan pabean impor. Kesalahan dalam pemberitahuan pabean akan menyebabkan diterbitkannya nota pembetulan dalam bentuk Penetapan Bea dan Cukai. Dalam hal kesalahan yang ditemukan pada saat proses *clearance*, maka akan diterbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Sedangkan dalam hal kesalahan yang ditemukan pada saat *post clearance*, maka akan diterbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). *Post clearance* yang dimaksud disini adalah penelitian ulang atau audit kepabeanan. Berikut beberapa jenis kesalahan yang terjadi dalam pembuatan PIB:

1. Kesalahan jenis barang

Kesalahan pemberitahuan jenis barang identifikasi utamanya adalah melalui pemeriksaan fisik. Jenis barang akan menentukan *HS Code*. Pada akhirnya *HS Code* akan menentukan besarnya bea masuk dan pajak yang terutang. Sangat penting bagi bea cukai untuk memastikan jenis barang diberitahukan secara benar.

2. Kesalahan jumlah barang

Kesalahan pemberitahuan jumlah barang sebagian besar ditemui pada saat pemeriksaan fisik. Berdasar manajemen resiko, DJBC menetapkan jalur pelayanan impor atas setiap pengajuan pemberitahuan impor barang. Jalur pelayanan ini terdiri dari jalur merah dan jalur hijau. Dalam hal importasi ditetapkan mendapat pelayanan jalur merah, maka terhadap PIB tersebut akan dilakukan pemeriksaan fisik barang.

Pemeriksaan fisik dilakukan di lapangan pemeriksaan dengan disaksikan oleh importir atau kuasanya. Dalam hal jumlah barang didapati lebih besar dari yang diberitahukan, petugas pemeriksa barang akan menuangkan hasil temuannya pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP selanjutnya dikirimkan kepada petugas pemeriksa dokumen. Berdasar temuan pada LHP ini petugas pemeriksa dokumen akan menetapkan nilai pabean atas kelebihan jumlah barang dan menerbitkan SPTNP.

3. Kesalahan nilai pabean

Kesalahan pemberitahuan nilai pabean ini terkait dengan harga atau value barang. Biasanya petugas akan mencocokkan data nilai barang ini dengan bukti-bukti pelunasan atau pembayaran atas transaksi tersebut. Dalam hal transaksi belum dilakukan pelunasan, petugas akan memeriksa korespondensi terkait transaksi tersebut. *Purchase Order*, *Sales Contract*, catatan pembukuan dan pelunasan transaksi sebelumnya (atas pembelian yang berulang) dapat diajukan untuk membuktikan kebenaran nilai atau harga barang.

Bea cukai adalah instansi yang mengawasi lalu-lintas ekspor dan impor. DJBC memiliki data importasi dari Sabang sampai Merauke, dalam periode waktu yang panjang. Pemberitahuan pabean juga di-submit secara elektronik. Data importasi tersaji dalam database yang mudah diolah. Sangat mudah bagi bea cukai untuk membuat database harga pembandingan untuk menguji kewajaran nilai transaksi yang diberitahukan.

Dalam hal pemberitahuan harga barang diragukan kewajarannya, petugas dapat mengkonfirmasi dengan mengirimkan Instruksi Nilai Pabean (INP). INP berisi permintaan data dan dokumen tambahan terkait impor yang dilakukan. INP ini nantinya dijawab oleh importir dengan Deklarasi Nilai Pabean (DNP), yang berisi isian jawaban atas beberapa pertanyaan terkait proses importasi. Data dan dokumen tambahan dapat dilampirkan pada DNP untuk mendukung jawaban yang diberikan. Jika DNP dan lampirannya dianggap mampu memberikan keyakinan yang memadai, maka keraguan kebenaran harga barang dapat di-*drop* dan pemberitahuan diterima. Tetapi, dalam beberapa kesempatan ada juga yang dianggap tidak mampu membuktikan kebenaran nilai transaksi dan berujung pada penerbitan SPTNP.

4. Kesalahan tarif

Definisi tarif menurut undang-undang kepabeanan adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Kesalahan tarif ini hampir serupa dengan kesalahan jenis barang. Jenis barang yang berbeda akan menyebabkannya masuk dalam *HS Code* yang berbeda. Secara tidak langsung tarifnya juga dapat berbeda. Namun ada juga suatu kondisi dimana perusahaan sudah memberitahukan jenis barang yang secara benar, namun ditemukan kesalahan pembebanan tarif bea masuk. Contoh paling jamak dari kesalahan ini adalah ketika importasi menggunakan tarif preferensi, namun kemudian ditetapkan menggunakan tarif yang berlaku umum.

Importir yang mengimpor barang dari China dan menyertakan *Form E*, pada dasarnya dia dapat menggunakan tarif preferensi AC-FTA. Namun jika *Form E* ini terlambat diserahkan kepada petugas bea dan cukai, maka *Form E* ini akan dianggap gugur. Petugas akan menetapkan importasi ini menggunakan tarif umum. Karena sebelumnya diberitahukan menggunakan tarif preferensi, maka *billing* tagihan atas impor tersebut juga membayar sesuai tarif preferensi. Untuk mengoreksi kesalahan ini, petugas akan menerbitkan SPTNP. Lebih lanjut, SPTNP ini akan menjadi dasar penerbitan *billing* baru yang wajib dilunasi oleh importir.

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Perhitungan PPh Pasal 22, PPN, Dan Tarif Bea Masuk Terhadap Barang Impor Pada CV. Delima Mandiri.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kesalahan jenis barang
2. Kesalahan jumlah barang
3. Kesalahan nilai pabean
4. Kesalahan tarif

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membuat penelitian menjadi lebih spesifik dan masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti membatasi permasalahan agar tidak meluas dari yang sudah diidentifikasi. Oleh sebab itu penulis membatasi penelitian ini hanya pada menganalisis perhitungan PPh Pasal 22, PPN, dan bea masuk terhadap barang impor pada CV. Delima Mandiri.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perhitungan PPh Pasal 22 atas barang impor yang diterapkan CV. Delima Mandiri sudah sesuai dengan PMK No 41/PMK.010/2022?
2. Apakah perhitungan PPN atas barang impor yang diterapkan CV. Delima Mandiri sudah sesuai dengan peraturan Undang Undang No. 7 Tahun 2021?
3. Apakah perhitungan Bea Masuk atas barang impor pada CV. Delima Mandiri sudah sesuai dengan peraturan PMK 199/PMK.10/2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 22 atas barang impor yang diterapkan CV. Delima Mandiri sudah sesuai dengan PMK No 41/PMK.010/2022.
2. Untuk mengetahui perhitungan PPN atas barang impor yang diterapkan CV. Delima Mandiri sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui perhitungan Bea Masuk atas barang impor pada CV. Delima Mandiri sudah sesuai dengan PMK No 199/PMK.10/2019.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Penulis memperoleh manfaat dan menambah pengetahuan dalam memahami perpajakan impor di CV. Delima Mandiri.
2. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai perpajakan impor.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

4. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pemahaman di bidang kepabeanan dan perpajakan mengenai prosedur impor barang yang sesuai dengan perundang-undangan.

5. Bagi Akademisi

Menambah kepustakaan mengenai kebijakan tentang prosedur impor untuk meningkatkan pengetahuan teoritis bagi kalangan akademis yang mendalami bidang pajak khususnya kebijakan mengenai perhitungan PPh pasal 22, PPN, dan bea masuk terhadap barang impor.

1.7 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi, beberapa literatur dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, serta kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.